

Modul Pelatihan

# Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Analisis Anggaran dan Advokasi

Serial Peningkatan Kapasitas  
Mitra MADANI



Modul Pelatihan

# Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Analisis Anggaran dan Advokasi

Serial Peningkatan Kapasitas  
Mitra MADANI

**Seknas FITRA**

Jl. Tebet Timur Dalam IX C No.4  
Tebet, Jakarta Selatan  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820  
T:(021) 22834660  
E:sekretariat@seknasfitra.org  
www.seknasfitra.org

September 2021

# DAFTAR ISI

Daftar Isi	III
Pokok Bahasan 1 : Tata Kelola dan Struktur Pemerintah Daerah	1
Pokok Bahasan 2 : Analisis Anggaran Daerah	5
Pokok Bahasan 3 : Advokasi Anggaran Daerah	10
Lampiran	15



Pokok Bahasan 1

# **Tata Kelola dan Struktur Pemerintah Daerah**

## Pengantar



**T**ata kelola pemerintahan yang baik merupakan jembatan untuk mewujudkan pelayanan publik lebih optimal. Ini bukan jargon tapi semacam prasyarat bagi pemerintah dan pemerintah daerah memenuhi hak-hak masyarakat. Sejak kebijakan desentralisasi diambil, pemerintah terus berupaya menyeimbangkan antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk perimbangan keuangan yang saat ini tengah digodok dalam Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD). Disinilah pentingnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan. Prinsip transparansi dan partisipasi dapat menjadi penopang yang kokoh bagi prinsip akuntabilitas pemerintah dan pemerintah daerah. Pada perkembangannya prinsip transparansi dan partisipasi juga mampu menumbuhkan saling kepercayaan (*trust*) antara pemerintah/pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Pada gilirannya, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik juga membutuhkan penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif.



## Tujuan

1. Peserta memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik
2. Berbagi pandangan terkait praktik baik tata kelola pemerintahan daerah di lokasi program MADANI
3. Berbagi pengalaman kerja-kerja kolaboratif masyarakat sipil dengan pemerintah daerah

## Sub Pokok Bahasan

- Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik
- Gambaran umum tata kelola pemerintahan daerah saat ini
- Kolaborasi kerja pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil
- Refleksi UU Pemerintahan Daerah dan Otonomi
- Desentralisasi dan optimalisasi pelayanan publik
- Pembagian fungsi dan urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Struktur pemerintahan daerah

## Proses Belajar

Pokok Bahasan 1 dibagi menjadi tiga (3) sesi, sebagai berikut:

Sesi 1: Prinsip dan gambaran umum tata kelola pemerintahan daerah

Sesi 2: Desentralisasi, pelayanan publik, dan kerja kolaborasi

Sesi 3: Pembagian urusan pemerintahan dan struktur pemerintah daerah

# Sesi 1 : Prinsip dan Gambaran Umum Tata Kelola Pemerintahan Daerah

## Metode Fasilitasi

1. Presentasi
2. Tanya Jawab
3. Curah Pendapat

## Langkah Fasilitasi

1. Fasilitator memperkenalkan diri dan memberi pengantar Pokok Bahasan 1;
2. Fasilitator menyampaikan tujuan sesi, Sub Pokok Bahasan 1 dan membagikan *Pre Test*;
3. Fasilitator mempresentasikan dengan singkat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan memberi beberapa contoh praktik baik;
4. Fasilitator membagikan kliping koran (studi kasus) tentang tata kelola pemerintahan daerah untuk dianalisis oleh peserta dan mendiskusikannya;
5. Fasilitator memandu peserta untuk berbagi pandangan dan pengalaman terkait praktik tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing;
6. Fasilitator memberikan konklusi dan menutup sesi 1



## Alat Bantu

1. Laptop
2. Power Point Presentation
3. Kliping Koran
4. Gambar/Foto Kasus
5. Quizizz

## Sesi 2 : Desentralisasi, Pelayanan Publik, dan Kerja Kolaborasi

### Metode Fasilitasi

1. Presentasi
2. Tanya Jawab
3. Curah Pendapat
4. Diskusi Kelompok

### Langkah Fasilitasi

1	Fasilitator memberi pengantar tentang pentingnya desentralisasi, potret pelayanan publik saat ini, dan kerja kolaborasi antar <i>stakeholders</i>
2	Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok mendiskusikan potret pelayanan publik dan pola kolaborasi yang sudah dibangun selama ini berdasarkan tematik issue masing-masing
3	Masing-masing peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan meminta kelompok lain menanggapi
4	Fasilitator memberikan konklusi dan menutup sesi 2



**Durasi**  
3 jam

## Sesi 3 : Pembagian Urusan Pemerintahan dan Struktur Pemerintah Daerah

### Metode Fasilitasi

1. Presentasi
2. Tanya Jawab
3. Curah Pendapat

### Langkah Fasilitasi

1	Fasilitator memberi pengantar tentang sub pokok bahasan dan tujuan sesi tiga
2	Fasilitator mengajak curah pendapat tentang implementasi otonomi daerah selama ini berdasar indikator pelayanan publik
3	Fasilitator menjelaskan pembagian fungsi dan urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
4	Fasilitator menjelaskan struktur pemerintahan daerah dan tugas pokoknya



**Durasi**

3 jam

### Bahan Bacaan

**UU No. 23 Tahun  
2014**

tentang Pemerintahan  
Daerah

**UU No. 33 Tahun  
2004**

tentang Perimbangan  
Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan  
Pemerintah Daerah

**UU No. 25 Tahun  
2009**

tentang Pelayanan  
Publik





Pokok Bahasan 2

# **Analisis Anggaran Daerah**

## Pengantar



**A**nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument penting untuk mengukur seberapa besar komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya yang tertuang dalam program, kegiatan dan proporsi anggaran yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. APBD dikatakan berpihak kepada masyarakat, apabila dalam proses penyusunan anggaran tersebut melibatkan kelompok-kelompok masyarakat terutama kelompok masyarakat rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok sektoral lainnya. Selain pelibatan kelompok-kelompok masyarakat tersebut, yang tidak kalah pentingnya adalah mengakomodir suara dan usulan mereka melalui program dan kegiatan yang didanai dari APBD.

Untuk mengukur proporsi anggaran daerah dapat dilakukan melalui beberapa alat analisis, diantaranya:

- 1) Analisis makro APBD, meliputi analisis tren Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Analisis konsistensi APBD dengan RKPD dan RPJMD; dan analisis APBD terhadap kepatuhan perundang-undangan;
- 2) Analisis Efisiensi dan Efektivitas APBD meliputi analisis standar belanja, analisis urusan atau sektoral, analisis belanja responsive gender dan inklusif."



## Tujuan

1. Peserta mengetahui dan memahami dasar-dasar filosofis kebijakan anggaran daerah (basic awareness)
2. Peserta mengetahui dan memahami Struktur APBD (budget control and regulation).
3. Peserta mengetahui, memahami dan memiliki keterampilan dalam melakukan analisis makro anggaran daerah (budget control and regulation).
4. Peserta mengetahui, memahami dan memiliki keterampilan dalam melakukan analisis anggaran sektoral

## Sub Pokok Bahasan

### I. Memahami Anggaran Daerah

- a. Filosofi dan Prinsip Anggaran
- b. Fungsi Anggaran dalam Tata Pemerintahan Daerah
- c. Landasan Hukum Perencanaan dan Penganggaran daerah
- d. Siklus, jadwal, perencanaan dan penganggaran daerah.
- e. Dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

### II. Struktur dan Analisis APBD

- a. Format dan Struktur APBD
- b. Kelompok, jenis dan obyek Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
- c. Analisis Makro APBD (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)

### III. Analisis APBD

#### Analisis anggaran sektoral



**Total Durasi**

10 Jam

# Memahami Anggaran Daerah

Sesi 1	Sesi 2
Filosofi dan Prinsip Anggaran	Siklus, jadwal, perencanaan dan penganggaran daerah.
Fungsi Anggaran dalam Tata Pemerintahan Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Landasan Hukum Perencanaan dan Penganggaran daerah	

## Metode Fasilitasi

Paparan  
Diskusi Kelas  
Pemutaran Video tentang Anggaran  
Diskusi Kelompok  
Quiz

## Alat Bantu

Materi Presentasi  
Soal *Pre test*  
Video  
Form Diskusi Kelompok Sesi 2  
Quizizz



**Durasi**  
4 Jam

## Bahan Bacaan:

Link Website FITRA

## Langkah

1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan salam
2. Fasilitator menjelaskan alur dan agenda pelatihan
3. Peserta mengisi *Pre Test* "Analisis Anggaran"
4. Fasilitator mengantar proses untuk penyampaian sub materi "Sesi 1"
  - a. Pemutaran Video tentang Anggaran, setelah itu fasilitator melakukan Brainstorming kepada peserta mengenai "pengetahuan dan pemahaman mereka tentang Anggaran" berdasarkan video ataupun dari pengalaman lainnya.
  - b. Setelah dianggap cukup, kemudian fasilitator menyampaikan Materi, yang dilanjutkan dengan tanya jawab
  - c. Untuk memperdalam dan mengetahui pengetahuan dan pemahaman peserta tentang anggaran, maka peserta diberikan "QUIZ" dengan menggunakan aplikasi Quizizz atau lainnya yang aksesibel bagi peserta
5. Fasilitator mengantar proses untuk penyampaian sub materi "Sesi 2"
  - a. Fasilitator melakukan Brainstorming mengenai "pengetahuan dan pemahaman peserta tentang Siklus dan dokumen PPA"
  - b. Selanjutnya Peserta dibagi kedalam kelompok kecil untuk diskusi kelompok, dengan jumlah per kelompok 4-5 orang. Diskusi (dibagi dalam 6-7 kelompok @5 orang)
  - c. Setiap kelompok melakukan diskusi kelompok dengan tugas membuat siklus PPA dan jenis dokumen yang dihasilkan pada setiap tahapan Paparan Hasil Quizizz atau lainnya yang aksesibel bagi peserta (breakout zoom)
  - d. Setelah diskusi kelompok selesai, semua peserta kembali ke Ruang Zoom besar, dan selanjutnya fasilitator memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempersentasikan hasil diskusinya. Jika waktu kurang mencukupi, maka presentasi kelompok bisa diwakili oleh 2-kelompok.
  - e. Untuk mempertajam hasil diskusi kelompok, Fasilitator memaparkan materi tentang PPD
  - d. Peserta diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan terkait materi yang diberikan.
6. Jika sudah cukup, maka Fasilitator menutup proses hari pertama dengan menyampaikan salam

## Struktur dan Analisis APBD

- a. Format dan Struktur APBD
- b. Kelompok, jenis dan obyek Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
- c. Analisis Makro APBD (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)

### Metode Fasilitasi

Paparan, Penugasan kelompok dan Presentasi, Quiz

### Langkah

1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan salam
2. Fasilitator melakukan Brainstorming untuk menggali pengetahuan dan pemahaman peserta tentang Struktur APBD
3. Selanjutnya Fasilitator memaparkan materi tentang tentang Struktur APBD, termasuk menjelaskan tentang Kelompok, jenis dan obyek Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta
4. Setelah dianggap cukup, kemudian fasilitator melanjutkan paparan materi tentang Paparan tentang teknik Analisis APBD "Analisis Makro"
5. Selanjutnya Peserta dibagi kedalam kelompok 6-7 kecil untuk diskusi kelompok, dengan jumlah per kelompok 4-5 orang. Pembagian kelompoknya mengacu pada pembagian kelompok pada Hari I
6. Setiap kelompok melakukan Praktek Analisis Anggaran "Analisis Makro" Pendapatan/Belanja/Pembiayaan,
7. Selanjutnya Presentasi kelompok, jika waktu mencukupi, maka semua kelompok mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tetapi jika waktu terbatas, maka presentasi akan diwakili berdasarkan bagian struktur anggaran yang dianlisi: dari kelompok yang menganalisis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
8. Setelah presentasi kelompok, dilanjutkan dengan tanya jawab, jika masih ada yang ingin ditanyakan oleh peserta
9. Untuk memperdalam dan mengetahui pengetahuan serta pemahaman peserta tentang Struktur APBD dan Teknik Analisis Makro, maka peserta diberikan "QUIZ" dengan menggunakan aplikasi Quiziz atau lainnya yang aksesibel bagi peserta
10. Proses hari kedua ditutup oleh fasilitator dengan menyampaikan salam, dan meningkatkan peserta untuk mengikuti proses pada hari ketiga



**Durasi**  
3 Jam

### Bahan Bacaan

**PP Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
**Permendagri 90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah  
**Permendagri Nomor 27 Tahun 2021** tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Keppmendagri 050-3708 Tahun 2020** tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

**Link Website SEKNAS FITRA** tentang Analisis Anggaran

### Alat Bantu

1. Bahan Presentasi
2. Form Analisis Makro (Kerja Kelompok)
3. Bahan Quiz

# Analisis APBD: Analisis Anggaran Sektoral

## Metode Fasilitasi

Paparan, Penugasan kelompok dan Presentasi, *Post Test*

## Langkah

1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan salam
2. Fasilitator melakukan Brainstorming untuk menggali pengetahuan dan pemahaman peserta tentang tentang sektor prioritas pelayanan publik dasar, termasuk OPD yang memiliki tupoksi terkait
3. Fasilitator memaparkan materi tentang teknik analisis anggaran sektoral dan dilanjutkan tanya jawab dengan peserta
4. Selanjutnya peserta dibagi kedalam kelompok kecil berdasarkan pembagian kelompok pada sesi sebelumnya
5. Setiap kelompok melakukan Praktek analisis anggaran "Analisis Sektoral" (Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, dsb sesuai sektor yang diadvokasi setiap LP)
6. Setelah selesai diskusi kelompok, maka semua kelompok kembali ke Ruang Zoom "besar" dan dilanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok. Kelompok yang tidak presentasi diberikan kesempatan memberikan pertanyaan
7. Kemudian Fasilitator memberikan penjelasan terkait pertanyaan peserta
8. Peserta mengerjakan *Post Test* dan dilanjutkan dengan RTL terkait hasil analisis anggaran (Diarahkan setiap peserta membuat analisis anggaran sektoral berdasarkan isu tematik yang diadvokasi)
9. Sesi hari ketiga ditutup oleh Fasilitator dengan menyampaikan salam,



## Durasi

3 Jam

## Alat Bantu

Bahan Presentasi

Form Analisis  
Makro (Kerja  
Kelompok)

Bahan Quiz

## Bahan Bacaan

Link Website Seknas FITRA



Pokok Bahasan 3

# **Advokasi Anggaran Daerah**

## Pengantar



**K**erja-kerja advokasi pada dasarnya merupakan gerakan yang dibangun untuk mewujudkan kebijakan publik, khususnya anggaran yang mempunyai keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat kebanyakan. Karenanya, salah satu indikator keberhasilan dari advokasi adalah adanya pembenahan dan perubahan kebijakan dari yang semula normatif, tertutup dan "mandeg" menjadi responsif, demokratis, dinamis dan inklusif. Disamping itu, hasil dari analisis anggaran yang akurat dan mendalam bisa digunakan untuk bahan litigasi dan mendorong upaya hukum apabila ditemukan mis-alokasi anggaran. Sebagai gerakan sosial, advokasi dituntut memiliki arah yang lebih jelas keberpihakannya terhadap kelompok yang dilemahkan. Sehingga kekuatan dukungan kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir dan kritis menjadi salah tantangan dalam advokasi kebijakan anggaran. Kecermatan dalam mengidentifikasi aktor-aktor baik yang akan dilibatkan sebagai daya dukung/ aliansi maupun pihak-pihak kunci sasaran advokasi serta pemetaan arena yang akan dijadikan fokus advokasi juga menjadi kunci keberhasilan advokasi.



## Tujuan

**Memperkuat kapasitas CSOs dalam melakukan pengawalan kebijakan anggaran publik**

**Meningkatkan pemahaman tentang konsepsi advokasi berbasis data dan hasil analisis anggaran**

**Pengayaan strategi advokasi yang lebih efektif dan berhasilguna.**

## Sub Pokok Bahasan

### A. Pengantar Advokasi Dasar

1. Pengertian Advokasi Kebijakan / Anggaran
2. Advokasi Kebijakan / Anggaran sebagai Partisipasi Publik
3. Prasyarat Advokasi ; Akses data/informasi

### B. Kerangka Kerja Advokasi Anggaran

1. Langkah Advokasi Kebijakan/Anggaran
2. Dinamika Advokasi Kebijakan / Anggaran
3. Proses Advokasi - Tahapan perencanaan penganggaran

### C. Strategi Advokasi Anggaran

1. Mengemas Issue Advokasi
2. Menentukan Strategi Advokasi:
  - Advokasi Persuasif: Lobby, Hearing, Kampanye, Kertas Kebijakan-Policy Brief
  - Advokasi Konfrontatif: Class action atau Class Representative, dll

# Pengantar Advokasi Dasar

1. Pengertian Advokasi Kebijakan / Anggaran
2. Advokasi Kebijakan / Anggaran sebagai Partisipasi Publik
3. Prasyarat Advokasi ; Akses data/informasi

Metode Fasilitasi	Alat Bantu
Paparan	Power Bantu
Curah Pendapat	Quizizz
Diskusi	Bahan Bacaan
Kesimpulan	

## Langkah

1. Pre Tes;
2. Fasilitator membuka dengan salam dan dilanjutkan memberikan pengantar materi advokasi dasar.
3. Kemudian fasilitator mengajak curah pendapat sekaligus testimoni tentang pengalaman advokasi yang dilakukan, baik yang berhasil ataupun tidak.
4. Selanjutnya fasilitator memberikan paparan singkat tentang pengertian dasar advokasi.
5. Dilanjutkan diskusi tanya jawab pendalaman tentang pengantar advokasi.
6. Setelah dianggap cukup fasilitator memberikan catatan akhir sebagai kesimpulan atas materi pada sub pokok bahasan.
7. Post tes
8. Selanjutnya fasilitator mengakhiri sesi pengantar advokasi dengan penutup / salam.



### Durasi

2 Jam

## Bahan Bacaan

Buku	Regulasi
1. Pengantar Advokasi Kebijakan;	1. UU 25/2004 tentang SPPN;
2. Pengantar Kebijakan Publik;	2. UU 14/2008 tentang KIP;
3. Memahami Advokasi Kebijakan: Konsep, Teori dan Praktik dalam Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Publik.	3. PP 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
	4. PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



## Kerangka Kerja Advokasi Anggaran

1. Langkah Advokasi Kebijakan/Anggaran
2. Dinamika Advokasi Kebijakan / Anggaran
3. Proses Advokasi - Tahapan perencanaan penganggaran

### Metode Fasilitasi

Paparan, diskusi kelompok, diskusi pleno, diskusi pendalaman dan kesimpulan

### Langkah

1. *Pre Test* Fasilitator memulai dengan salam pembuka.
2. Paparan materi sub pokok bahasan.
3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan komentar balik atas materi.
4. Selanjutnya fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan tahapan kerja-kerja advokasi berbasis pada pengalaman.
5. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
6. Setelah paparan fasilitator memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan umpan balik.
7. Setelah diskusi umpan balik selesai dilanjutkan dengan paparan kelompok lain.
8. Setelah semua kelompok selesai paparan dan umpan balik fasilitator memberikan catatan sebagai kesimpulan diskusi sub pokok bahasan dimaksud.
9. Post Tes; Fasilitator menutup dengan salam.



### Durasi

2 Jam

### Alat Bantu

Video Pendek Advokasi  
paparan power point  
quizizz  
google form

### Bahan Bacaan

Buku	Regulasi
1. Pengantar Advokasi Kebijakan;	1. UU 25/2004 tentang SPPN;
2. Pengantar Kebijakan Publik;	2. UU 14/2008 tentang KIP;
3. Memahami Advokasi Kebijakan: Konsep, Teori dan Praktik dalam Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Publik.	3. PP 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
	4. PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

# Strategi Advokasi Anggaran

1. Mengemas Issue Advokasi
2. Menentukan Strategi Advokasi
  - **Advokasi Persuasif:** Lobby, Hearing, Kampanye, Kertas Kebijakan-*Policy Brief*
  - **Advokasi Konfrontatif:** Class action atau Class Representative, dll

## Metode Fasilitasi

Pengantar materi, kerja kelompok, diskusi pleno, diskusi pendalaman, kesimpulan (Penerapan hasil analisis)

## Langkah

1. Fasilitator membuka sesi dengan salam dilanjutkan memberikan pengantar singkat terkait materi pada sub pokok bahasan.
2. Kemudian fasilitator kembali mengajak curah pendapat terkait pengalaman advokasi masing-masing peserta/lembaga.
3. Kemudian fasilitator membagi tema-tema advokasi sesuai hasil analisis anggaran sektoral yang telah disusun pada sesi analisis anggaran
4. Kemudian fasilitator membagi peserta dalam kelompok tema untuk mendiskusikan tentang bagaimana strategi advokasi yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan.
5. Setelah semua kelompok selesai berdiskusi, fasilitator meminta masing-masing peserta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dan kemudian kelompok lain diberikan kesempatan untuk menyampaikan komentarnya.
6. Setelah semua kelompok menyampaikan paparan dan memberikan komentar imbal balik, fasilitator meminta kepada peserta untuk memberikan catatan yang dianggap sebagai sebuah kesimpulan pembelajaran.
7. Selanjutnya fasilitator memberikan penekanan-penekanan atas seluruh proses diskusi materi sub pokok bahasan dimaksud.
8. Fasilitator mengakhiri sesi dengan salam/penutup.



### Durasi

2 Jam

## Alat Bantu

Lembar kasus hasil analisis anggaran  
Skema-Skenario Advokasi

## Bahan Bacaan

Buku	Regulasi
1. Pengantar Advokasi Kebijakan;	1. UU 25/2004 tentang SPPN;
2. Pengantar Kebijakan Publik;	2. UU 14/2008 tentang KIP;
3. Memahami Advokasi Kebijakan: Konsep, Teori dan Praktik dalam Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Publik.	3. PP 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
	4. PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



Lampiran

# **Tabel Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas**

## Governance & Struktur Pemda

**Pokok Bahasan** : Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Struktur Pemerintahan Daerah yang Efektif

- Tujuan**
1. Peserta memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik
  2. Berbagi pandangan terkait praktik tata kelola pemerintahan daerah di lokasi MADANI
  3. Berbagi pengalaman kerja-kerja kolaboratif masyarakat sipil dengan pemerintah daerah

Pengantar Materi	Sub Pokok Bahasan	Metode Fasilitasi	Langkah-Langkah Fasilitasi	Durasi	Alat Bantu	Bahan Bacaan
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan jembatan untuk mewujudkan pelayanan publik lebih optimal. Ini bukan jargon tapi semacam prasyarat bagi pemerintah dan pemerintah daerah memenuhi hak-hak masyarakat. Sejak kebijakan desentralisasi diambil, pemerintah terus berupaya menyeimbangkan antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk perimbangan keuangan yang saat ini tengah digodok dalam Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD). Disinilah pentingnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan. Prinsip transparansi dan partisipasi dapat menjadi penopang yang kokoh bagi prinsip akuntabilitas pemerintah dan pemerintah daerah. Pada	Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik	1. Presentasi	1. Fasilitator memperkenalkan diri dan memberi pengantar Pokok Bahasan, Tujuan, Sub Pokok Bahasan dan membagikan Pre Test	30 menit	Power Point Presentation	UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
	Gambaran umum tata kelola pemerintahan daerah saat ini	2. Tanya Jawab	2. Fasilitator mempresentasikan dengan singkat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan memberi beberapa contoh praktik baik	60 menit	Kliping Koran	UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
		3. Curah Pendapat	3. Fasilitator memandu peserta untuk berbagi pandangan terkait praktik tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing	80 menit	Gambar/Foto Kasus	UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik
			4. Fasilitator memberikan konklusi dan menutup sesi hari 1	10 menit	Quizz	
	Kolaborasi kerja pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil	1. Presentasi	1. Fasilitator memberi pengantar tentang pentingnya kerja kolaborasi antar stakeholder	20 menit		

<p>perkembangannya prinsip transparansi dan partisipasi juga mampu menumbuhkan saling kepercayaan (trust) antara pemerintah/pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Pada gilirannya, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik juga membutuhkan penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif.</p>		2. Diskusi Kelompok	2. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok mendiskusikan pola kolaborasi yang sudah dibangun selama ini berdasarkan tematik issue masing-masing	60 menit		
		3. Curah Pendapat	3. Masing-masing peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan meminta kelompok lain menanggapi	60 menit		
			4. Fasilitator memberikan konklusi dan menutup sesi hari ke 2	10 menit		
	Refleksi UU Pemerintahan Daerah dan Otonomi	1. Presentasi	1. Fasilitator memberi pengantar tentang Sub pokok bahasan dan tujuan sesi di hari ke tiga	30 menit		
	Tujuan Desentralisasi untuk Mendekatkan Pelayanan Publik	2. Tanya Jawab	2. Fasilitator mengajak curah pendapat tentang implementasi otonomi daerah selama ini berdasar indikator pelayanan publik	60 menit		
	Pembagian Fungsi dan Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	3. Curah Pendapat	3. Fasilitator menjelaskan pembagian fungsi dan urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	30 menit		
	Struktur Pemerintahan Daerah		4. Fasilitator menjelaskan struktur pemerintahan daerah dan tugas pokoknya	30 menit		

## Analisis Anggaran Daerah

**Pokok Bahasan** : Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- Tujuan** :
1. Peserta mengetahui dan memahami dasar-dasar filosofis kebijakan anggaran daerah (*basic awareness*).
  2. Peserta mengetahui dan memahami Struktur APBD (*budget control and regulation*).
  3. Peserta mengetahui, memahami dan memiliki keterampilan dalam melakukan analisis makro anggaran daerah (*budget control and regulation*).
  4. Peserta mengetahui, memahami dan memiliki keterampilan dalam melakukan analisis anggaran sektoral

Pengantar Materi	Sub Pokok Bahasan	Metode Fasilitasi	Langkah-Langkah Fasilitasi	Durasi	Alat Bantu	Bahan Bacaan
<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument penting untuk mengukur seberapa besar komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya yang tertuang dalam program, kegiatan dan proporsi anggaran yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. APBD dikatakan berpihak kepada masyarakat, apabila dalam proses penyusunan anggaran tersebut melibatkan kelompok-kelompok</p>	<p><b>I. Memahami Anggaran Daerah:</b></p>	<p>Paparan, Diskusi Kelas, Diskusi Kelompok, Pemutaran Video ttg Anggaran, Quiz</p>	1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan salam	5 Menit	<p>1. Materi Presentasi 2. Soal Pre Test 3. Bahan Quiz (aplikasi Quizizz dll) 4. Video 5. Form Diskusi Kelompok Sesi 2</p>	<p>Link Web Seknas FITRA</p>
	<p>Sesi 1 :</p> <p>a. Filosofi dan Prinsip Anggaran</p> <p>b. Fungsi Anggaran dalam Tata Pemerintahan Daerah</p> <p>c. Landasan Hukum Perencanaan dan Penganggaran daerah"</p>		2. Fasilitator menjelaskan alur dan agenda pelatihan	5 Menit		
			<p><b>3. Peserta mengisi Pre Test "Analisis Anggaran"</b></p>	15 Menit		
			<p><b>4. Fasilitator mengantar proses untuk penyampaian sub materi "Sesi 1"</b></p>	90 menit		
			<p>a. Pemutaran Video tentang Anggaran, setelah itu fasilitator melakukan Brainstorming kepada peserta mengenai "pengetahuan dan pemahaman mereka tentang ANGGARAN" berdasarkan video ataupun dari pengalaman lainnya.</p>			
			<p>b. Setelah dianggap cukup, kemudian fasilitator menyampaikan Materi, yang dilanjutkan dengan tanya jawab</p>			
	<p>c. Untuk memperdalam dan mengetahui pengetahuan dan pemahaman peserta tentang anggaran, maka peserta diberikan "QUIZ" dengan menggunakan aplikasi Quizizz atau lainnya yang aksesibel bagi peserta</p>					

<p>masyarakat terutama kelompok masyarakat rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok sectoral lainnya. Selain pelibatan kelompok-kelompok masyarakat tersebut, yang tidak kalah pentingnya adalah mengakomodir suara dan usulan mereka melalui program dan kegiatan yang didanai dari APBD. Untuk mengukur proporsi anggaran daerah dapat dilakukan melalui beberapa alat analisis, diantaranya :</p> <p>1). Analisis makro APBD, meliputi analisis tren Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Analisis konsistensi APBD dengan RKPD dan RPJMD; dan analisis APBD terhadap kepatuhan</p>	<p>Sesi II: a. Siklus, jadwal, perencanaan dan penganggaran daerah. B. Dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.</p>	<p><b>5. Fasilitator mengantar proses untuk penyampaian sub materi "Sesi 2"</b></p>	120 menit		
		<p>a. Fasilitator melakukan Brainstorming mengenai "pengetahuan dan pemahaman peserta tentang Siklus dan dokumen PPA"</p>			
		<p>b. Selanjutnya Peserta dibagi kedalam kelompok kecil untuk diskusi kelompok, dengan jumlah per kelompok 4-5 orang. Diskusi (dibagi dalam 6-7 kelompok @5 orang)</p>			
		<p>c. Setiap kelompok melakukan diskusi kelompok dengan tugas membuat siklus PPA dan jenis dokumen yang dihasilkan pada setiap tahapan Paparan Hasil Quiziz atau lainnya yang aksesibel bagi peserta (breakout zoom)</p>			
		<p>d. Setelah diskusi kelompok selesai, semua peserta kembali ke Ruang Zoom besar, dan selanjutnya fasilitator memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempersentasikan hasil diskusinya. Jika waktu kurang mencukupi, maka presentasi kelompok bisa diwakli oleh 2-kelompok.</p>			
		<p>e. Untuk mempertajam hasil diskusi kelompok, Fasilitator memaparkan materi tentang PPD</p>			
		<p>f. Peserta diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan terkait materi yang diberikan.</p>	5 menit		
		<p><b>6. Jika sudah cukup, maka Fasilitator menutup proses hari pertama dengan menyampaikan salam</b></p>			

perundang-undangan; 2) Analisis Efisiensi dan Efektivitas APBD meliputi analisis standar belanja, analisis urusan atau sectoral, analisis belanja responsive gender dan inklusif."	<b>II. Struktur dan Analisis APBD (1)</b>	Paparan, Penugasan kelompok dan Presentasi, Quiz	1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan salam	5 menit	1. Bahan Presentasi 2. Form Analisis Makro (Kerja Kelompok) 3. Bahan Quiz	1. PP Nomor 12 Tahun 2019 2. Permendagri 90 Tahun 2019 3. Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 4. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 5. Link Website SEKNAS FITA tentang Analisis Anggaran
	a. Format dan Struktur APBD		2. Fasilitator melakukan Brainstorming untuk menggali pengetahuan dan pemahaman peserta tentang Struktur APBD	150 menit		
	b. Kelompok, jenis dan obyek Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah		3. Selanjutnya Fasilitator memaparkan materi tentang Struktur APBD, termasuk menjelaskan tentang Kelompok, jenis dan obyek Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta			
	c. Analisis Makro APBD (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)		4. Setelah dianggap cukup, kemudian fasilitator melanjutkan paparan materi tentang Paparan tentang teknik Analisis APBD "Analisis Makro"			
			5. Selanjutnya Peserta dibagi kedalam kelompok 6-7 kecil untuk diskusi kelompok, dengan jumlah per kelompok 4-5 orang. Pembagian kelompoknya mengacu pada pembagian kelompok pada Hari I			
			6. Setiap kelompok melakukan Praktek Analisis Anggaran "Analisis Makro" Pendapatan/Belanja/Pembiayaan,			
			7. Selanjutnya Presentasi kelompok, jika waktu mencukupi, maka semua kelompok mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tetapi jika waktu terbatas, maka presentasi akan diwakili berdasarkan bagian struktur anggaran yang dianalisis: dari kelompok yang menganalisis pendapatan, belanja, dan pembiayaan			
			8. Setelah presentasi kelompok, dilanjutkan dengan tanya jawab, jika masih ada yang ingin ditanyakan oleh peserta			
			9. Untuk memperdalam dan mengetahui pengetahuan serta pemahaman peserta tentang Struktur APBD dan Teknik Analisis Makro, maka peserta diberikan "QUIZ" dengan menggunakan aplikasi Quiziz atau lainnya yang aksesibel bagi peserta			
			10. Proses hari kedua ditutup oleh fasilitator dengan menyampaikan salam, dan mengangkat peserta untuk mengikuti proses pada hari ketiga	15 menit		



	<b>II. Analisis APBD (2)</b>		1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan salam	5 Menit	1. Bahan Presentasi 2. Form Analisis Makro (Kerja Kelompok) 3. Bahan Quiz	Link Seknas FITRA
			2. Fasilitator melakukan Brainstorming untuk menggali pengetahuan dan pemahaman peserta tentang tentang sektor prioritas pelayanan publik dasar, termasuk OPD yang memiliki tupoksi terkait	15 Menit		
	<b>Analisis anggaran sektoral</b>	Paparan, Penugasan kelompok dan Presentasi, <i>Post Test</i>	3. Fasilitator memaparkan materi tentang teknik analisis anggaran sektoral dan dilanjutkan tanya jawab dengan peserta	30 Menit		
			4. Selanjutnya peserta dibagi kedalam kelompok kecil berdasarkan pembagian kelompok pada sesi sebelumnya	5 menit		
			5. Setiap kelompok melakukan Praktek analisis anggaran "Analisis Sektoral" (Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, dsb sesuai sektor yang diadvokasi setiap LP)	120 menit		
			6. Setelah selesai diskusi kelompok, maka semua kelompok kembali ke Ruang Zoom "besar" dan dilanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok. Kelompok yang tidak presentasi diberikan kesempatan memberikan pertanyaan			
			7. Kemudian Fasilitator memberikan penjelasan terkait pertanyaan peserta			
			8. Peserta mengerjakan <i>Post Test</i> dan dilanjutkan dengan RTL terkait hasil analisis anggaran (Diarahkan setiap peserta membuat analisis anggaran sektoral berdasarkan isu tematik yang diadvokasi)	15 menit		
			10. Sesi hari ketiga ditutup oleh Fasilitator dengan menyampaikan salam	5 menit		

## Advokasi Anggaran Daerah

**Pokok Bahasan** : Advokasi Anggaran Daerah

- Tujuan** :
1. Memperkuat kapasitas CSOs dalam melakukan pengawalan kebijakan anggaran publik
  2. Meningkatkan pemahaman tentang konsepsi advokasi berbasis data dan hasil analisis anggaran
  3. Pengayaan strategi advokasi yang lebih efektif dan berhasilguna.

Pengantar Materi	Sub Pokok Bahasan	Metode Fasilitasi	Langkah-Langkah Fasilitasi	Durasi	Alat Bantu	Bahan Bacaan
Kerja-kerja advokasi pada dasarnya merupakan gerakan yang dibangun untuk mewujudkan kebijakan publik, khususnya anggaran yang mempunyai keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat kebanyakan. Karenanya, salah satu indikator keberhasilan dari advokasi adalah adanya pembenahan dan perubahan kebijakan dari yang semula normatif, tertutup dan "mandeg" menjadi responsif, demokratis, dinamis dan inklusif. Disamping itu, hasil	<b>PENGANTAR ADVOKASI DASAR</b> 1. Pengertian Advokasi Kebijakan / Anggaran 2. Advokasi Kebijakan / Anggaran sebagai Partisipasi Publik 3. Prasyarat Advokasi ; Akses data/informasi	Paparan, Curah pendapat, Diskusi, Kesimpulan	1. Pre Tes; 2. Fasilitator membuka dengan salam dan dilanjutkan memberikan pengantar materi advokasi dasar. 3. Kemudian fasilitator mengajak curah pendapat sekaligus testimoni tentang pengalaman advokasi yang dilakukan, baik yang berhasil ataupun tidak. 4. Selanjutnya fasilitator memberikan paparan singkat tentang pengertian dasar advokasi. 5. Dilanjutkan diskusi tanya jawab pendalaman tentang pengantar advokasi. 6. Setelah dianggap cukup fasilitator memberikan catatan akhir sebagai kesimpulan atas materi pada sub pokok bahasan. 7. Post tes 8. Selanjutnya fasilitator mengakhiri sesi pengantar advokasi dengan penutup / salam.	120 menit	Power point; Quiziz; bahan bacaan	<b>Buku:</b> 1. Pengantar Advokasi Kebijakan; 2. Pengantar Kebijakan Publik; 3. Memahami Advokasi Kebikajan: Konsep, Teori dan Praktik dalam Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Publik.

<p>dari analisis anggaran yang akurat dan mendalam bisa digunakan untuk bahan litigasi dan mendorong upaya hukum apabila ditemukan mis-alokasi anggaran. Sebagai gerakan sosial, advokasi dituntut memiliki arah yang lebih jelas keberpihakannya terhadap kelompok yang dilemahkan. sehingga kekuatan dukungan kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir dan kritis menjadi salah tantangan dalam advokasi kebijakan anggaran. Kecermatan dalam mengidentifikasi aktor-aktor baik ayang akan dilibatkan sebagai daya dukung/ aliansi maupun pihak-pihak kunci sasaran advokasi serta pemetaan arena yang akan dijadikan fokus advokasi juga menjadi kunci</p>	<p><b>KERANGKA KERJA ADVOKASI ANGGARAN</b>  1. Langkah Advokasi Kebijakan/Anggaran  2. Dinamika Advokasi Kebijakan / Anggaran  3. Proses Advokasi - Tahapan perencanaan penganggaran</p>	<p>Paparan, diskusi kelompok, diskusi pleno, diskusi pendalaman dan kesimpulan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Pre Test</i> Fasilitator memulai dengan salam pembuka.</li> <li>2. Paparan materi sub pokok bahasan.</li> <li>3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan komentar balik atas materi.</li> <li>4. Selanjutnya fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan tahapan kerja-kerja advokasi berbasis pada pengalaman.</li> <li>5. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.</li> <li>6. Setelah paparan fasilitator memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan umpan balik.</li> <li>7. Setelah diskusi umpan balik selesai dilanjutkan dengan paparan kelompok lain.</li> <li>8. Setelah semua kelompok selesai paparan dan umpan balik fasilitator memberikan catatan sebagai kesimpulan diskusi sub pokok bahasan dimaksud.</li> <li>9. Post Tes; Fasilitator menutup dengan salam.</li> </ol>	<p>120 menit</p>	<p>Video Pendek Advokasi ; paparan power point; Quizizi; google form</p>	<p><b>Regulasi:</b>  1. UU 25/2004 tentang SPPN;  2. UU 14/2008 tentang KIP;  3. PP 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  4. PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>
---	--	--	---	------------------	--	---

keberhasilan advokasi.	<p><b>STRATEGI ADVOKASI ANGGARAN</b></p> <p>1. Mengemas Issue Advokasi</p> <p>2. Menentukan Strategi Advokasi:</p> <p><b>o Advokasi Persuasif</b></p> <p>a. Lobby</p> <p>b. Hearing</p> <p>c. Kampanye</p> <p>d. Kertas Kebijakan-Policy Brief</p> <p><b>o Advokasi Konfrontatif</b></p> <p>Class action atau Class Representative, dll</p>	Pengantar materi, kerja kelompok, diskusi pleno, diskusi pendalaman, kesimpulan (Penerapan hasil analisis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator membuka sesi dengan salam dilanjutkan memberikan pengantar singkat terkait materi pada sub pokok bahasan.</li> <li>2. Kemudian fasilitator kembali mengajak curah pendapat terkait pengalaman advokasi masing-masing peserta/lembaga.</li> <li>3. Kemudian fasilitator membagi tema-tema advokasi sesuai hasil analisis anggaran sektoral yang telah disusun pada sesi analisis anggaran</li> <li>4. Kemudian fasilitator membagi peserta dalam kelompok tema untuk mendiskusikan tentang bagaimana strategi advokasi yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan.</li> <li>5. Setelah semua kelompok selesai berdiskusi, fasilitator meminta masing-masing peserta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dan kemudian kelompok lain diberikan kesempatan untuk menyampaikan komentarnya.</li> <li>6. Setelah semua kelompok menyampaikan paparan dan memberikan komentar imbal balik, fasilitator meminta kepada peserta untuk memberikan catatan yang dianggap sebagai sebuah kesimpulan pembelajaran.</li> <li>7. Selanjutnya fasilitator memberikan penekanan-penekanan atas seluruh proses diskusi materi sub pokok bahasan dimaksud.</li> <li>8. Fasilitator mengakhiri sesi dengan salam/penutup.</li> </ol>	120 menit	Lembar kasus hasil analisis anggaran ; Skema-Skenario Advokasi	
------------------------	---	---	---	-----------	--	--